
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotabaru

Yayu*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*yayu9810@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the effect of the PAD effectivity ratio and APBD efficiency ratio on economic growth in the Kotabaru district. To answer the problem, Multiple Linear Regression Analysis is used. The data used in this study are secondary data on the budget realization report at constant prices based on business 2010 - 2018. The results of the research based on Multiple Linear Regression analysis show that the PAD effectivity ratio has a significant effect on economic growth in Kotabaru Regency, and APBD efficiency significant affects economic growth in the Kotabaru district.

Keywords: PAD Effectivity Ratio, APBD Efficiency Ratio, Economic Growth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2010-2018.

Berdasarkan hasil dari penelitian Analisis Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD dan efisiensi APBD berpengaruh signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

Kata kunci: Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi APBD, dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan tentang Pemerintah Daerah kewenangan pemerintah daerah lebih besar dari sebelum di berlakukannya Undang-Undang tersebut. Maka diterapkannya kedua Undang-Undang tersebut campur tangan pemerintah pusat berkurang, namun pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya harus lebih ditingkatkan. Kemanapun pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya bisa diukur menggunakan analisis kinerja keuangan.

Menurut Halim, cara menganalisis suatu kinerja keuangan daerah dalam pengelolannya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan yang sudah ditetapkan serta dilakukan dan terdapat pada APBD.

Dengan melakukan analisis pada laporan keuangan daerah, maka pemerintah bisa mempertahankan atau meningkatkan dari yang telah diperoleh saat ini, dilihat dari *value of money* terdapat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Kotabaru.

Tabel 1
Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi APBD, dan Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas PAD	Belanja	Pendapatan	Rasio Efisiensi APBD	Pertumbuhan Ekonomi
2010	667.433,02	437.042,20	65,48	7.805.173,28	6.679.501,23	116,85	5,49
2011	685.276,04	484.990,58	70,77	7.739.426,16	8.471.951,18	91,35	5,96
2012	627.880,22	544.077,21	86,65	8.715.529,59	10.788.508,48	80,79	6,53
2013	802.569,95	996.333,93	124,14	10.850.532,78	11.786.734,03	92,06	5,22
2014	1.060.549,83	1.147.747,91	108,22	12.822.529,35	13.237.286,25	96,87	4,66
2015	1.109.116,36	1.513.359,06	136,45	14.440.345,15	14.140.560,27	102,12	3,31
2016	1.646.399,04	1.402.862,29	85,21	15.317.418,58	14.198.556,90	107,88	4,25
2017	1.355.198,09	1.180.112,75	87,08	16.001.328,32	13.766.141,74	116,24	5,01
2018	1.421.633,32	1.318.840,60	92,77	14.433.092,97	14.385.592,08	100,33	4,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotabaru, diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa penurunan terendah Pendapatan di Kabupaten Kotabaru yaitu ada komponen Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2010 maka menyebabkan Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan dalam rasio efektivitas PAD sebesar 65,48%. Akan tetapi di tahun 2011-2012 mengalami peningkatan tetapi melambat, dan mulai meningkat sangat efektif pada tahun 2013-2015, namun pada tahun 2016 rasio efektivitas PAD mengalami penurunan yang kurang efektif sebesar 85,21% yang dikarenakan terjadi penurunan dari ketiga komponen PAD diantaranya yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pada tahun 2017-2018 kembali mengalami peningkatan hingga cukup efektif. Terjadinya peningkatan yang tidak stabil pada rasio efektivitas PAD dari tahun 2010-2018 yang dominan disebabkan oleh retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara rata-rata rasio efisiensi APBD Kabupaten Kotabaru dari tahun 2010-2018 tidak efisien dengan persentase di atas >40%. Persentase rasio efisiensi APBD tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 116,85% yang disebabkan tidak berkembangnya suatu pertumbuhan APBD dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk anggaran belanja dengan realisasi pendapatannya yang di terima itu tidak sesuai dengan efisiensinya.

Dilihat dari tabel 1 bahwa, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru pada periode 2010-2018 menunjukkan kecenderungan menurun yang disebabkan naik turunnya pertumbuhan ekonomi hampir semua lapangan usaha.

Hasil penelitian rasio efektivitas PAD berdampak positif akan perkembangan ekonomi di Kota Tangerang dilihat pada suatu anggaran mampu melampaui dari yang ditetapkan. Sedangkan untuk efisiensi APBD sendiri berdampak negatif akan perkembangan ekonomi Kota Tangerang disebabkan meningkatnya biaya di daerah dibandingkan dari yang didapatkan, maka dari itu dapat terjadi suatu perkembangan ekonomi.

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam kajian terdiri dari : (1) apakah perkembangan ekonomi berdampak pada suatu efektivitas PAD Kabupaten Kotabaru?, (2) apakah efisiensi APBD berdampak akan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) mengetahui pengaruh suatu rasio efektivitas PAD dan efisiensi APBD pada perkembangan ekonomi yang ada Kabupaten Kotabaru. (2) untuk mengetahui variabel mana yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dari pendapatannya maupun belanja, dimana akan dibandingkan antara realisasi dengan target anggaran pada tahun berjalan.

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi, bahwa efektivitas PAD menggambarkan suatu potensi bagi pemerintah untuk merealisasikan penerimaan PAD yang sudah ditentukan.

Tabel 2
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

Rasio Efisiensi APBD

Suatu bentuk perbandingan antara besarnya biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima.

Tabel 3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi APBD

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
10%-20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2010)

Keuangan Daerah

Merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk suatu uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan setempat. Dengan itu pemerintah daerah pada rangka otonomi sebagai meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mamesah dapat disimpulkan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dalam satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran anggaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun tertentu. Sedangkan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber dari pemerintah daerah untuk menutupi pengeluaran yang dimaksud.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dihitung berdasarkan PDRB tahun sekarang dikurangi PDRB tahun lalu kemudian dibagi PDRB tahun lalu dikalikan seratus. Hasilnya, dapat diperoleh angka pertumbuhan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Astuti (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan” yang menyatakan bahwa berdampak positif pada perkembangan ekonomi dengan perhitungan rasio kemandirian dan rasio efektivitas, sedangkan untuk rasio efisiensi mengalami tidak terjadinya signifikan pada perkembangan ekonomi.

Penelitian Sudrajat (2018) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat” menunjukkan bahwa hasil rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, rasio efisiensi PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian.

Penelitian Ridho (2019) “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2018)” menunjukkan hasil bahwa berdampak positif akan perkembangan ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan perhitungan rasio efektivitas, dan juga berdampak negatif akan perkembangan ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan perhitungan rasio efisiensi, serta rasio kemandirian dan rasio perkembangan PAD yang simultan berdampak akan pertumbuhan Kota Tangerang Selatan dengan kinerja keuangan.

Penelitian Kawa (2011) berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)” menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk mengetahui suatu pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat suatu kinerja keuangan daerah akan perkembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru.

Objek dari kajian ini yang didasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Kotabaru.

Jenis dan Sumber Data

Yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder bersumber dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Maka sumber penelitian tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Kotabaru.

Definisi Operasional Variabel

Rasio Efektivitas PAD

Adalah suatu perbandingan antara realisasi pendapatan PAD dengan target Pendapatan PAD di Kabupaten Kotabaru tahun 2010-2018.

Rasio Efisiensi APBD

Suatu perbandingan antara realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kotabaru tahun 2010-2018.

Pertumbuhan Ekonomi

output yang meningkat dari hasil masyarakat dengan alat ukur pada waktu tertentu dan melalui persentase pertambahan pendapatan nasional riil .

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melengkapi data untuk penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data secara tertulis atau mengutip dari dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Analisis Data

Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan beberapa rumus untuk mengetahui suatu peningkatan nilai persentase dari masing alat analisis

yaitu dengan perhitungan Regresi Linier berganda, uji Asumsi Klasik, rasio efektivitas PAD dan Efisiensi APBD.

Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi APBD

$$\text{Rasio Efisiensi APBD} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pertumbuhan ekonomi

α : konstanta

X_1 : rasio efektivitas PAD

X_2 : rasio efisiensi APBD

β : koefisien regresi

ε : *error term*

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk mengetahui suatu variabel bebas serta variabel lainnya, dimana untuk melihat apakah ada terjadinya multikolinieritas antara variabel bebas tersebut dengan variabel bebas lainnya.

Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi merupakan suatu data yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi linier tersebut terjadinya autokolerasi atau tidaknya. Dalam model ini menggunakan suatu metode *Brusch-Godfrey* atau *LM (Lagrange Multiplier) Test*.

HASIL DAN ANALISIS

Laporan realisasi Anggaran PAD, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2018

Tahun	Pendapatan		Belanja		Surplus (Defisit)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2010	7.316.626,08	6.679.501,23	9.187.649,37	7.805.173,28	(1.883.003,29)	(1.332.652,05)
2011	8.820.250,20	8.471.951,18	9.493.915,27	7.739.426,16	(6.879.515,79)	7.208.899,81
2012	10.132.500,12	10.788.508,48	11.432.352,03	8.715.529,59	(1.299.581,90)	2.072.978,89
2013	11.452.348,62	11.786.734,03	14.459.914,72	10.850.532,78	(3.107.566,11)	9.362.012,54
2014	12.749.948,36	13.237.286,25	16.566.211,10	12.822.529,35	(3.816.262,74)	4.147.569,02
2015	14.222.329,16	14.140.560,27	18.393.093,80	14.440.345,15	(4.170.764,64)	(2.997.848,77)
2016	14.121.380,52	14.198.556,90	17.753.550,48	15.317.418,58	(3.632.169,96)	(1.118.861,67)
2017	17.080.785,86	13.766.141,74	19.449.599,92	16.001.328,32	(2.368.814,07)	(2.215.186,58)
2018	16.572.655,05	14.385.592,08	16.719.914,21	14.433.092,97	(1.472.591,63)	(47.500,89)

Sumber :BPKAD Kabupaten Kotabaru, 2018

Dilihat bahwa pada 2010 realisasi pendapatan lebih kecil dengan anggran yang sudah ditetapkan, meskipun pada sisi belanja realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan akan diperkirakan terjadinya suatu kelebihan anggaran pada sisi anggran belanja. Karena pada sisi realisasi pendapatan lebih kecil komponen Kabupaten Kotabaru mengalami defisit sebesar (1.332.652,05). Setelah terjadinya defisit, pada tahun 2011-2014 di Kabupaten Kotabaru mengalami surplus secara berturut-turut dalam anggaran.

Dari sisi pendapatan realisasi ditahun 2011 lebih sedikit dibandingkan dengan anggarannya yang telah ditentukan, maka Kabupaten Kotabaru mengalami surplus sebesar 7.208.899,81.

Sementara pada tahun 2012-2014 dalam sisi pendapatan realisasinya lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan dengan didukung dari sisi realisasi belanja yang lebih kecil diabndingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga Kabupaten Kotabaru tersebut mengalami surplus.

Sedangkan di tahun 2015-2018 mengalami defisit, meskipun setelah empat tahun mengalami surplus tidak menutup kemungkinan bahwa kabupaten Kotabaru akan mengalami defisit. Seperti halnya dalam empat tahun terakhir ini dimana pendapatan realisasinya lebih kecil dari pada sisi anggarannya oleh karena itu dari segi pendapatan daerah berkurang meskipun dengan belanja.

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010-2018

Tahun	Persentase (%)
2010	5,49
2011	6,34
2012	6,53
2013	5,22
2014	4,66
2015	3,31
2016	4,25
2017	5,00
2018	4,88
Rata-rata	45,3

Sumber : Hasil olah data penulis

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru mengalami ketidakstabilan karena terjadi peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya dalam tahun penelitian yaitu tahun 2010-2018 yang disebabkan oleh kurangnya meningkat nilai produksi hampir pada semua lapangan usaha.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2018

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Persentase %	Kriteria
2010	437.042,20	667.433,02	65,48	Tidak Efektif
2011	484.990,58	685.276,04	70,77	Tidak Efektif
2012	544.077,21	627.880,22	86,65	Kurang Efektif
2013	996.333,93	802.569,95	124,14	Sangat efektif
2014	1.147.747,91	1.060.549,83	108,22	Sangat efektif
2015	1.513.359,06	1.109.116,36	136,45	Sangat efektif
2016	1.402.862,29	1.646.399,04	85,21	Kurang Efektif
2017	1.180.112,75	1.355.198,09	87,08	Kurang Efektif
2018	1.318.840,60	1.421.633,32	92,77	Cukup Efektif
Rata-rata			95,20	

Sumber : diolah dari data sekunder

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas PAD mengalami ketidakstabilan dari tahun 2010-2018. Rasio efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 136,45%, sedangkan pada rasio efektivitas PAD terendah yaitu sebesar

65,48% dengan memiliki rata-rata sebesar 95,20% dari tahun 2010-2018 di Kabupaten Kotabaru.

Rasio Efisiensi APBD

Tabel 4
Hasil Perhitungan Efisiensi APBD
Kabupaten Kotabaru Tahun 2010-2018

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Presentase %	Kriteria
2010	7.805.173,28	6.679.501,23	116,85	Tidak Efisien
2011	7.739.426,16	8.471.951,18	91,35	Tidak Efisien
2012	8.715.529,59	10.788.508,48	80,79	Tidak Efisien
2013	10.850.532,78	11.786.734,03	92,06	Tidak Efisien
2014	12.822.529,35	13.237.286,25	96,87	Tidak Efisien
2015	14.440.345,15	14.140.560,27	102,12	Tidak Efisien
2016	15.317.418,58	14.198.556,90	107,88	Tidak Efisien
2017	16.001.328,32	13.766.141,74	116,24	Tidak Efisien
2018	14.433.092,97	14.385.592,08	100,33	Tidak Efisien
Rata-rata			100,50	

Sumber : diolah dari data sekunder

Berdasarkan perhitungan tabel 4, rasio efiseinsi di Kabupaten Kotabaru pada 2010-2018 mengalami tidak efisiensi dengan rata-rata rasio diatas 40%. Sedangkan di 2010 paling terkecil yaitu sebesar 116,85%. Untuk rata-rata rasio efiseinsi Kabupaten Kotabaru 2010-2018 senilai 100,50%.

Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
Rasio efektivitas PAD	13.66068	1.902435	7.180627	0.0004
Rasio efiseinsi APBD	-0.033449	0.007899	-4.234577	0.0055
Pertumbuhan Ekonomi	-0.053741	0.015654	-3.432961	0.0139
R-squared	0.801801			
Adjusted R-squared	0.735735			
f-statistic	12.13634			
Prob(f-statistic)	0.007786			

Sumber : Hasil Data Menggunakan *E-views 9*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil dari uji regresi linier berganda terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru bahwa nilai koefisien dari variabel independen -0.033449 dan -0.053741, sedangkan nilai konstanta sebesar 13.66068. Oleh karena itu, diperoleh dengan persamaan regresi $Y = 13.66068 - 0.033449X_1 - 0.053741X_2$.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient variance	Uncenterd VIF	Centered VIF
Rasio Efektivitas PAD	6.24305	20.50333	1.057043
Rasio Efisiensi APBD	0.000245	86.17847	1.057043
Pertumbuhan Ekonomi	3.619260	124.4704	NA

Sumber : Hasil Data Menggunakan *E-views 9*

Berdasarkan tabel 6 bahwa hasil uji multikolinieritas pada centered VIF, yang dimana nilai VIF rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD sama-sama 1,057. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya suatu multikolinieritas terhadap kedua variabel bebas tersebut.

Uji Autokorelasi

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.125195	Prob. F(2,4)	0.8857
Obs*R-squared	0.530191	Prob. Chi Square(2)	0.7671

Sumber : Hasil Data Menggunakan *E-views 9*

Dari tabel 7 yang memiliki nilai Prob. F (2,4) \neq sebesar 0,8857. Maka dapat dikatakan bahwa dari uji autokorelasi yang berarti H_0 diterima dimana tidak terjadinya suatu autokorelasi pada kedua variabel bebas.

Analisis Pengaruh Rasio efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru

Dari analisis data yang menggunakan regresi linier berganda bahwa menyatakan adanya suatu pengaruh yang secara negatif pada rasio efektivitas PAD terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru. Berdampaknya efektivitas PAD akan perkembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru dapat dilihat sesuai PAD dengan total rata-rata nilai persentase rasio efektivitas PAD sebesar 95,20% yang dikategorikan cukup efektif.

Analisis pengaruh Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru

Dari pengujian data menggunakan regresi linier berganda dimana H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima artinya adanya pengaruh secara negatif akan perkembangan Ekonomi Kabupaten Kotabaru dari perhitungan rasio efiseinsi APBD. Berpengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru dapat melihat dari suatu anggaran APBD Kabupaten Kotabaru dengan menggunakan anggaran defisit. Untuk itu sesuai teori keynes bahwa suatu pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana semakin banyak pengeluaran, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Dalam hasil perhitungan rasio efektivitas PAD diketahui bahwa selama tahun penelitian yaitu dari tahun 2010-2018 hanya ada tiga tahun yang mencapai kategori sangat efektivitas yaitu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015. Sedangkan tahun-tahun penelitian yang lain termasuk dalam kategori kurang efektif dan cukup efektif. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi APBD diketahui bahwa selama periode penelitian yaitu dari tahun 2010-2018 tidak ada satupun yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena semuanya termasuk dalam kategori tidak efisien.

Setelah dilakukan penelitian terkait pengaruh efektivitas PAD dan efisiensi APBD akan perkembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru, bahwa dari uji regresi linier berganda terlihat kedua variabel bebas tersebut adanya pengaruh signifikan akan variabel tetap yaitu perkembangan ekonomi di Kabupaten Kotabaru. Selain itu dilihat dari nilai R-squared nya sebesar 0.801801. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan juga teradap variabel tetap karena nilai R-squared $>0,50$.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan kedua variabel, yaitu efektivitas PAD dan Efisiensi APBD dimana kurang menunjukkan hasil dari penelitiannya akan perkembangan Ekonomi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD selama tahun 2010-2018 yaitu sebanyak 9 tahun hanya dalam tiga tahun yang termasuk dalam kategori sangat efektif yaitu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu dengan presentase rasio efektivitasnya sebesar 124,14%; 108,22% dan 136,45%. Karena berdasarkan kriteria dari rasio efektivitas apabila nilai rasionya diatas 100% (>100%) tergolong dalam kategori sangat efektif. (2) Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi APBD selama tahun 2010-2018 yaitu sebanyak 9 tahun tidak ada satupun yang termasuk dalam kategori sangat efisien dikarenakan seluruh hasil rasio efisien lebih besar dari 40% (>40%). Berdasarkan kriteria dari rasio efisiensi apabila nilai rasionya <10% tergolong dalam kategori sangat efisien. (3) Selain itu, untuk variabel bebas dari hasil uji regresi berganda diketahui memiliki nilai probability <0,05 sehingga disimpulkan bahwa kedua rasio tersebut sebagai variabel bebas berdampak secara signifikan pada perkembangan ekonomi.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) Bagi pemerintah daerah khususnya pada bagian keuangan dalam mengelola keuangan daerah lebih di perhatikan antara anggaran dengan realisainya agar danya keselarasan antara anggaran yang dibuat dengan realisasi yang ada. Selain itu, lebih diperhatikan besarnya pendapatan dan belanja yang akan dianggarkan sehingga tidak terjadi defisit pada perekonomian. Karena apabila sudah ada keselarasan antara pendapatan dan biaya yang akan dikeluarkan maka rasio efektivitas PAD akan lebih cenderung tergolong dalam kategori sangat efektif serta rasio efisiensi APBD akan lebih cenderung dalam kategori sangat efisien. (2) Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian dengan variabel yang sama, maka diharapkan dapat membandingkan dengan kabupaten lain, agar dapat menjadi bahan perbandingan dalam hasil penelitian.

Bibliography

Badan Pusat Statistik, B. (2016). *Kotabaru Dalam Angka 2016*. Kotabaru: Badan Pusat Statistik.

- Kawa, E. P. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Halim, A. (2007). *Akutansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat.
- BPK,RI. (2014, Oktober 02). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- BPK RI. (2015, November 21). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari JPIK BPK RI: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.